

**MITIGASI BENCANA DAERAH TUJUAN WISATA  
STUDI KASUS: PENTINGSARI, NGLANGGERAN, PENGLIPURAN  
(TOURISM DESTINATIONS DISASTER MITIGATION  
CASE STUDIES: PENTINGSARI, NGLANGGERAN, PENGLIPURAN)**

**Setiawan Priatmoko, Yitno Purwoko, Anwani**

STIE Pariwisata API Yogyakarta

Jl. Glendongan, Babarsari TB XV, Sleman, Yogyakarta-Indonesia

**Abstract**

*The use of MSPDM (Marketability, Sustainability, Participatory, & Disaster Mitigation) analysis in community-based tourism (CBT) areas quite helpful. CBT helps stakeholders in planning the development of tourist areas in rural destination. In the MSPDM analysis there are various indicator sizes that can be used to assess a CBT area. In this study, we only present the results of an assessment of the DM/Disaster mitigation aspects of all the MSPDM analysis indicators available. CBT Nglanggeran and Pentingsari in Yogyakarta and Penglipuran in Bali have implemented several things that support disaster mitigation in its areas. The purpose of disaster mitigation is primarily to reduce the risk of disasters that occur to local residents and visitors. Disaster mitigation measures are carried out and adjusted to the characteristics of the local environmental and cultural area.*

**Keywords:** MSPDM, Disaster Mitigation, Pentingsari, Nglanggeran, Penglipuran

**Abstrak**

Pemanfaatan analisis MSPDM (*Marketability, Sustainability, Participatory, & Disaster Mitigation*) pada kawasan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism/CBT*). CBT membantu pemangku kepentingan dalam merencanakan pengembangan kawasan wisata. Di dalam analisis MSPDM terdapat berbagai ukuran indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu kawasan CBT. Pada penelitian ini kami hanya menampilkan hasil penilaian dari aspek DM/ Disaster mitigation (mitigasi bencana) dari keseluruhan indikator analisis MSPDM yang ada. CBT Nglanggeran dan Pentingsari di Yogyakarta serta Penglipuran di Bali telah menerapkan beberapa hal yang mendukung dalam mitigasi bencana di kawasan wisata. Tujuan mitigasi bencana ini terutama adalah mengurangi resiko bencana yang terjadi pada warga lokal dan wisatawan. Tindakan mitigasi bencana dilakukan menyesuaikan karakteristik kawasan lingkungan dan budaya setempat.

**Kata kunci:** MSPDM, Mitigasi Bencana, Pentingsari, Nglanggeran, Penglipuran

**PENDAHULUAN**

Wisata pedesaan menjadi trend dalam industri pariwisata di Indonesia saat ini. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik sepanjang tahun 2018 jumlah desa wisata di Indonesia mencapai 1.734 desa (Reily, n.d.). Wisata pedesaan adalah kegiatan yang menjadikan suasana dan konten desa sebagai bagian tak terpisahkan untuk menjadi sebuah kegiatan bisnis wisata. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia membagi indikator Pengembangan Desa Wisata menjadi Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri.

Potensi daya tarik wisata di Indonesia antara lain kesenian dan budaya khas pedesaan, kisah sejarah, kuliner, flora, fauna, serta aneka kerajinan berbahan alami, dan kondisi alam. Wisata pedesaan dikelola oleh komunitas masyarakat setempat sehingga dalam terminologi internasional disebut pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism/ CBT*). Pelaku bisnis wisata pedesaan biasanya berfokus pada kondisi atraksi, infrastuktur fisik, dan promosi. Mitigasi bencana masih belum menjadi wacana yang disepakati bersama bagi banyak

pengelola dan pemangku kepentingan. Selain itu perbedaan asumsi dan pemahaman akan suatu resiko bencana antara pengelola dan wisatawan juga menjadi isu yang penting. Hal yang secara resiko dianggap berbahaya bagi pengunjung belum tentu dianggap sebuah resiko bencana berbahaya bagi warga desa begitu pula sebaliknya. Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia DIBI-BNPB, terlihat bahwa dari lebih dari 1.800 kejadian bencana pada periode tahun 2005 hingga 2015 lebih dari 78% atau 11.648 kejadian bencana merupakan bencana hidro meteorologi dan hanya sekitar 22% atau 3.810 merupakan bencana geologi (Amri et al., 2016). Angka peristiwa bencana terkait cuaca, air, dan api memang cukup tinggi. Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca esktrim. Sedangkan untuk kelompok bencana geologi yang tercatat sering menimpa Indonesia adalah gempa, tsunami, letusan gunung berapi, dan erosi atau longsornya tanah. Perlu diwaspadai bahwa kecenderungan jumlah kejadian bencana secara total untuk kedua jenis kelompok yang relatif terus meningkat (Amri et al., 2016). Hal yang menarik, terlepas dari beberapa bencana alam dan ancaman keamanan sosial selama periode tahun 2014 yaitu letusan gunung berapi Kelud dan ancaman yang diposting di media sosial, pengunjung ke Borobudur terus tumbuh dengan stabil dari 2012 hingga 2015. Ini artinya pengelolaan mitigasi bencana atas resiko bagi wisatawan dan penduduk lokal tetap harus ada. Padahal biasanya rantai pasokan global akan mengalami efek ketika satu negara dilanda bencana alam, pabrik-pabrik di seberang lautan juga menderita konsekuensi (Mahbubani, 2012). Perubahan iklim, kerusakan politik, bencana alam, dan pandemi semuanya berdampak pada pola perjalanan (Deuchar, 2012). Kawasan Desa Wisata (CBT) yang dipilih adalah Desa Wisata Pentingsari dan Nglanggeran di Yogyakarta serta Desa Wisata Penglipuran di Bali karena dianggap sebagai contoh Desa Wisata terbaik di Indonesia dan banyak memperoleh penghargaan internasional.

Analisis MSPDM adalah analisis yang digunakan untuk melakukan penilaian sekaligus

pentargetan pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat sebagai alternatif pengganti analisis SWOT. Titik berat analisis MSPDM adalah pengkuantitatifan dan penetapan berbagai variabel dan indikator aspek Pemasaran (Marketibility), Keberlanjutan (Sustainability), Partisipasi (Participatory), dan Mitigasi bencana (Disaster Mitigation) (Priatmoko, 2019). Di dalam analisis MSPDM terdapat berbagai indikator sebagai panduan untuk mengukur suatu kondisi sebuah area CBT. Variabel-variabel yang diukur dalam analisis MSPDM dalam aspek Marketibility (Pemasaran) adalah penentuan pasar, keunikan dan orisinilitas produk, harga yaitu kesepakatan atas margin keuntungan dan pembagiannya, distribusi produk wisata, dan promosi. Variabel-variabel dalam Sustainability (Keberlanjutan) adalah daya dukung tiap produk-produk wisata, pengelolaan limbah, konservasi, kunjungan wisatawan yang berlanjut, dan pengembangan bisnis masyarakat setempat. Variabel-variabel dalam aspek Participatory (Partisipatif) adalah penguasaan sumber daya dan tanggung jawab lokal oleh warga serta variasi produk antar wilayah. Sedangkan variabel-variabel dalam aspek Disaster Mitigation (Mitigasi Bencana) adalah pengukuran manajemen bencana alam dan bencana non alam khususnya untuk penanganan resiko-resiko yang mungkin timbul atas produk-produk wisata serta resiko bencana sosial (Priatmoko, 2019).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, bencana adalah gangguan serius terhadap berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan dampak luas terhadap manusia, material, dampak ekonomi atau lingkungan dari kerugian yang melebihi kemampuan komunitas yang terkena dampak atau komunitas untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (UNISDR, 2009). Oleh karena itu manfaat mitigasi bencana menjadi manfaat sosial berupa keselamatan yang diterima oleh komunitas akan tindakan pengelolaan mitigasi misalnya dari aneka resiko bencana alam (van den Honert, 2016). Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Republik Indonesia, 2007).

Mitigasi berupaya untuk mencegah peristiwa berbahaya dan, jika mungkin, mengurangi keparahan yang terjadi, dan meminimalkan kerugian dan efek kerusakan lanjutannya (Miller et al., 2016). Masih menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, potensi penyebab bencana di wilayah Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial (Republik Indonesia, 2007). Tiap daerah Desa Wisata di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda atas ketiga potensi bencana tersebut.

Berangkat dari tiga jenis bencana ini dan kerangka kerja lainnya, analisis terkait diperlukan untuk memitigasi untuk mengurangi risiko yang lebih besar bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Tempat atau titik-titik penanganan situasi darurat juga penting untuk direncanakan dan dipilih secara tepat untuk mengurangi efek bencana (Kahani, Ghazi, Akbari, & Hosseini, 2016). Kerugian akibat bencana alam tidak mungkin dihilangkan atau dihindari sepenuhnya, namun bukti empirik menunjukkan bahwa menerapkan langkah-langkah mitigasi bencana dapat membantu masyarakat untuk pulih lebih cepat dari situasi krisis (van den Honert, 2016).

Wisata pedesaan sering digunakan sebagai alat untuk membantu, mengembangkan, dan membangun kembali berbagai daerah desa. Selama ini Desa Wisata sering dianggap kurang memberikan manfaat ekonomi maksimal yang diharapkan, penciptaan lapangan kerja, dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, juga masyarakat perdesaan sering kekurangan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk berhasil menarik dan memuaskan wisatawan (Dashper, 2014). Walaupun demikian keterlibatan pemerintah dalam mengembangkan bisnis lokal ini masih diperlukan. Bastakis et.al. dalam Situmorang, et.al. (2019) berpendapat bahwa masyarakat lokal harus menggunakan peluang yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kewirausahaan yang sukses, ia juga menambahkan bahwa bantuan dari pemerintah mungkin tidak cukup untuk mendukung masyarakat lokal jika masyarakat setempat tidak memiliki kapasitas untuk menyerap keterampilan dan

pengetahuan yang diberikan (Situmorang, Trilaksono, & Japutra, 2019).

Dukungan pemerintah untuk kegiatan Desa Wisata serta pemahaman mitigasi bencana dan masalah sosial seperti yang terkandung dalam undang-undang harus dijalankan secara selaras. Secara lebih lanjut perlu diperhatikan pentingnya kewirausahaan pariwisata bagi negara berkembang karena dapat membantu meningkatkan pendapatan, terutama di sektor pariwisata, serta berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat sekitar (Situmorang et al., 2019). Hal berbeda diungkapkan oleh Manaf et.al (2018) bahwa kurangnya pengalaman masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, serta ketergantungan mereka pada keahlian eksternal telah diatasi sebagai tantangan dalam pariwisata berbasis masyarakat Pada kasus demikian masih jarang terjadi, selain itu Desa Wisata yang mampu benar-benar mengatasi permasalahannya belum signifikan. Oleh karena itu pada kesempatan yang sama Manaf et.al (2018) menyatakan pengembangan tujuan wisata tidak dapat dipisahkan dari berbagai peran pemangku kepentingan terkait dalam elemen sistem pariwisata yang ada di luar kemampuan warga lokal (Manaf et al., 2018). Meskipun keselamatan, keamanan dan manajemen krisis saat terjadi bencana adalah menjadi bagian dari tugas pengelola Desa Wisata tetapi umumnya belum nampak jelas apa yang dilakukan untuk itu (Adeyinka-Ojo, Khoo-Lattimore, & Nair, 2014). Seperti misalnya masyarakat di daerah Borobudur, Jawa Tengah melakukan penanaman pohon keras pada area perbukitan yang lebih tinggi untuk menghindari erosi dan memperkuat struktur tanah sejak tahun 1977-1979 (Fatimah, 2015). Penanaman tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat bukan hanya oleh pihak pengelola kawasan. Penelitian lain juga menemukan bahwa perbaikan fasilitas keselamatan dilakukan di kawasan wisata agro Condet, Jakarta Timur (Azriati & Kausar, 2018).

Wang dalam Adeyinka-Ojo et al. (2014) mencantumkan soal mitigasi bencana dalam pendekatan komprehensifnya yang mengidentifikasi tiga tema selain fungsi pemasaran destinasi wisata. Tema-tema ini adalah: (1) strategi dan pendekatan

untuk mengelola pemangku kepentingan tujuan; (2) prinsip dan strategi untuk mengelola daya saing dan keberlanjutan; dan (3) prinsip dan strategi untuk keselamatan, bencana dan manajemen krisis (Adeyinka-Ojo et al., 2014). Gempa tidak hanya menciptakan cetak biru untuk sektor pariwisata di Nglanggeran untuk dikembangkan, tetapi juga membuat masyarakat setempat membangun kembali dirinya sendiri dan memperkuat ikatan yang lebih erat antara para anggotanya setelah bencana (Putri & Adinia, 2018).

Jumlah korban meninggal, luka dan hilang pada kejadian bencana di Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia mencapai 750 orang pada tahun 2015 dan 3.199 orang pada tahun (Purbasari & Manaf, 2018). Pada tahun 2006 wilayah Manding di Yogyakarta terkena dampak bencana alam gempa bumi, yang meruntuhkan pusat industri kulit di Desa itu. Untuk bisnis, dampak penuh dari bencana sering hanya dinilai akibatnya tetapi pendekatan pemikiran ke depan perlu diterapkan untuk mengurangi potensi kerusakan (Tibay et al., 2018). Sebagai bagian dari pendekatan berwawasan ke depan, bersiap atas hal yang tak terduga adalah kunci utama dalam perencanaan ketahanan.

Khusus untuk sektor pariwisata yang masih dianggap sebagai bisnis dengan “skala kecil, tingkat diversifikasi pasar rendah, dan tingkat kegagalan yang lebih tinggi dari rata-rata” membuat sektor ini lebih rentan terhadap bencana besar yang tidak cukup sering terjadi untuk menjamin implementasi rencana kesiapsiagaan (Tibay et al., 2018). Oleh karena itu, memahami wilayah CBT pasca bencana perlu dikaitkan dengan konsep pariwisata secara umum. CBT adalah bentuk unik dari industri pariwisata, karena biasanya terletak di daerah perdesaan, dikelola oleh masyarakat dengan cara ‘komunal’, dan melibatkan sejumlah kecil orang (Rindrasih, 2018). Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik perlu dibangun antara para pemangku kepentingan utama (BNPB/BPBD, Perusahaan Pariwisata, dan Pemangku kepentingan Industri Pariwisata) untuk membuat pemulihan bencana lebih efisien dan efektif (Mannakkara, Wilkinson, Willie, & Heather, 2018).

**METODE**

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan indikator mitigasi bencana pada tabel analisis MSPDM. Indikator yang digunakan dalam analisis MSPDM antara lain variabel Pemasaran, Keberlanjutan, Partisipatif, dan Mitigasi Bencana. Namun dalam penelitian ini hanya difokuskan membahas aspek mitigasi bencana/disaster mitigation (DM) dengan menggunakan indikator yang ada di dalamnya. Penilaian kuantitatif pada tabel tidak digunakan karena pada kesempatan ini peneliti hanya akan membuat deskripsi sistematis tentang keberadaan mitigasi bencana yang dikelola di daerah wisata perdesaan berdasarkan variabel dan indikator yang ada. Adapun variabel dan indikator Disaster Mitigation dalam analisis MSPDM dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Penilaian Aspek Mitigasi Bencana

PARAMETER	RINCIAN UNSUR	NILAI DAN INDIKATORNYA
(A) Bencana alam	Antisipasi terhadap resiko dan perencanaan pemulihan (recovery)	1. Bila Belum ada antisipasi dan rencana penyelamatan bencana gempa bumi dan tanah longsor
		2. Bila sudah ada antisipasi dan rencana penyelamatan bencana gempa bumi dan tanah longsor namun belum tersosialisasi
		3. Bila sudah ada sosialisasi dan pelatihan penyelamatan
		4. Bila sudah ada jalur penyelamatan dan tim khusus yang menangani kebencanaan oleh warga setempat
		5. Bila sudah ada rencana dan konsep wilayah pemulihan pasca bencana

PARAMETER	RINCIAN UNSUR	NILAI DAN INDIKATORNYA
(B) Bencana non alam akibat gagal teknologi, wabah penyakit, bencana sosial	Antisipasi kesalahan human eror dan standarisasi minimal keamanan dan kesehatan	1. Bila Belum ada antisipasi dan standarisasi keamanan minimal dan kesehatan
		2. Bila Sudah ada standarisasi minimal namun belum dijadikan acuan
		3. Bila sudah ada standarisasi dan menjadi acuan pelaku wisata dan wisatawan
		4. Bila sudah ada standarisasi internasional kamanan dan kesehatan yang ditaati
		5. Sudah ada standarisasi keamanan dan kesehatan dan ditegakannya sanksi bagi yg melanggar oleh masyarakat setempat

Sumber: Priatmoko, 2019

Data tentang keberadaan manajemen mitigasi bencana yang diolah menggunakan struktur konsep berdasarkan tabel di atas. Data tersebut diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, pencarian sumber-sumber informasi yang dianggap relevan, berita online, dan studi literatur. Khusus untuk Desa Penglipuran tidak dilakukan studi lapangan dan hanya dilakukan studi literatur dan wawancara dengan tour leader yang pernah mengunjungi

Desa tersebut. Para peneliti mewawancarai manajer Desa Wisata, dan orang-orang yang ditunjuk sebagai koordinator penyedia elemen destinasi termasuk atraksi, pelaku usaha wisata, akomodasi, dan pemimpin masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata Desa. Data yang diperoleh tersebut kemudian dipaparkan sehingga diperoleh gambaran tentang manajemen pengelolaan bendananya.

### HASIL PEMBAHASAN

Dalam aspek mitigasi bencana, dua jenis bencana dikelompokkan, yaitu: 1. Bencana alam dalam hal kondisi dan sejarah bencana regional yang akan dikembangkan, misalnya, gempa bumi dan atau tsunami telah terjadi, 2. Bencana non-alam terutama untuk menangani risiko yang mungkin timbul untuk produk dalam dan luar masyarakat. Khusus untuk Desa Wisata Pentingsari yang berada di bawah kaki gunung berapi aktif, pemerintah secara teratur menyebarkan informasi untuk mengingatkan masyarakat tentang risiko dan tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat (Rindrasih, 2018). Di Nglanggeran, upaya penguatan struktur tanah dilakukan dengan penambahan tanggul di beberapa daerah dengan lanskap miring untuk mencegah bahaya tanah longsor (Hermawan, 2017). Di Penglipuran, distribusi zona spasial dilakukan, tempat untuk semua Desa dan ruang untuk rumah yang dimiliki ditentukan oleh penduduk untuk memfasilitasi pengelolaan dan mitigasi (Priyoga & Sudarwani, 2018). Rincian aspek-aspek MSPDM khususnya terkait mitigasi bencana dari ketiga Desa di atas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Mitigasi Bencana Pada Lokasi Desa Wisata

	Pentingsari	Nglanggeran	Penglipuran
Mitigasi Bencana/ Disaster Mitigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kewaspadaan dan kerjasama dengan banyak pihak untuk pembaruan status aktifitas Gunung Merapi</li> <li>❖ rute evakuasi dan peringatan</li> <li>❖ standar internasional higienitas toilet</li> <li>❖ kegiatan ronda malam bersama pengunjung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Standar higienitas untuk produk makanan</li> <li>❖ Membangun penguatan tanah-tanah yang rawan longsor</li> <li>❖ rute evakuasi</li> <li>❖ pengaturan dan pembatasan jumlah pengunjung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penentuan zona-zona tertentu untuk memudahkan fungsi dan keselamatan (Bhanu Rizfa &amp; Amos, 2016)</li> <li>❖ Penyediaan klinik kesehatan (Andriyani, Martono, &amp; Muhammad, 2017)</li> <li>❖ Penetapan titik parkir mobil dan bis jauh dari rumah-rumah adat/tradisional</li> <li>❖ sistem 1 (satu) pintu masuk</li> </ul>

Sumber: hasil analisis timpeneliti, 2019

Untuk aspek mitigasi bencana mereka berfokus pada bencana alam (misalnya: letusan gunung berapi, gempa, dan tanah longsor), dan bencana non-alam. Mereka memperhatikan keamanan pangan, standar kesehatan dan keselamatan juga menyediakan rute evakuasi. Sedangkan untuk bencana sosial masih berupa langkah pembagian keuntungan ekonomi dari aktifitas pariwisata. Untuk kerawanan sosial dari luar secara umum ketiga Desa ini belum mempersiapkan instrumen yang baku. Hal ini barangkali terkait dengan kultur orang Desa yang selalu menyambut baik tamu.

Dari informasi yang diperoleh, pemahaman tentang mitigasi bencana tidak selalu diberikan di awal kunjungan wisatawan. Informasi mengenai mitigasi resiko hanya diketahui oleh pengelola kawasan. Wisatawan mendapatkan informasi mitigasi bencana apabila mereka diberitahu oleh pengelola. Informasi statis semacam papan pengumuman atau penunjuk rute-rute evakuasi yang komprehensif masih belum banyak ditemui. Hal ini dimungkinkan karena adanya bias pemahaman bagi warga setempat bahwa seolah-olah pengunjung telah mempunyai pemahaman yang sama dengan warga lokal. Walaupun demikian, pemahaman tentang mitigasi bencana yang dimiliki oleh warga lokal pengelola CBT telah membawa peningkatan kualitas kawasan yang cukup signifikan. Standar-standar higienitas, pelestarian nilai-nilai lokal, dan pengurangan resiko atas kejadian bencana yang diterapkan membuat kawasan tersebut menjadi lebih baik. Bahkan dengan pemahaman mitigasi bencana ini dapat mengurangi nilai-nilai yang sebelumnya dianggap tabu (pamali) bagi masyarakat ketika membicarakan kemungkinan adanya bencana.

## **KESIMPULAN**

Analisis MSPDM sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang faktor mitigasi bencana di kawasan wisata. Aspek penilaian Disaster Mitigation yang muncul dalam bentuk penilaian kuantitatif membantu pengguna analisis MSPDM untuk mengevaluasi dan menentukan target perbaikan selanjutnya. Kawasan wisata yang berupa CBT perlu memperhatikan aspek-aspek disaster mitigation sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Pemanfaatan mitigasi bencana pada dasarnya akan meningkatkan kualitas

lingkungan alam dan masyarakat setempat. Hambatan kultural berupa tabu membicarakan bencana yang mungkin terjadi dapat diminimalisir dengan analisis MSPDM dengan memberikan sistem penilaian diri yang ditetapkan parameternya. Walaupun demikian, ada hal yang masih perlu diwacanakan lebih luas lagi yaitu mitigasi resiko bencana sosial dari luar masyarakat atau pengunjung. Riset di kawasan wisata yang masih dalam tahap rintisan dimungkinkan akan bisa mendapatkan temuan gambaran yang lebih komprehensif lagi atas pemanfaatan analisis MSPDM ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adeyinka-Ojo, S. F., Khoo-Lattimore, C., & Nair, V. (2014). A Framework for Rural Tourism Destination Management and Marketing Organisations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 144, 151–163. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.284>
- Amri, M. R., Yulianti, G., Yunus, R., Wiguna, S., Adi, A. W., Ichwana, A. N., ... Septian, R. T. (2016). *Risiko Bencana Indonesia*. (R. Jati & M. R. Amri, Eds.). Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Andriyani, A. A. I., Martono, E., & Muhammad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23, 1–6. <https://doi.org/2527-9688>
- Azriati, N. N., & Kausar, D. (2018). Pengembangan Potensi Wisata Agro Di Kawasan Condet Kelurahan Balekambang Jakarta Timur. *Journal Of Tourism Destination And Attraction*, 6(2), 59–69.
- Bhanu Rizfa, H., & Amos, S. (2016). Bali Traditional Settlement Morphology Analysis Penglipuran, Kubu Village, Bangli Regency, Bali Province. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 43(1), 47–53. <https://doi.org/10.9744/dimensi.43.1.47-54>
- Dasher, K. (Ed.). (2014). *Rural tourism: An International Perspective*. Encyclopedia of Tourism (I). 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British: Cambridge Scholars Publishing. [https://doi.org/10.1016/S01607383\(02\)00009-9](https://doi.org/10.1016/S01607383(02)00009-9)

- Deuchar, C. (2012). Small Tourism Enterprise Network Formation in Rural Destinations: Integrating ICT and Community in Western Southland New Zealand. Auckland University of Technology. Retrieved from <https://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/4520/DeucharC.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Fatimah, T. (2015). The Impacts of Rural Tourism Initiatives on Cultural Landscape Sustainability in Borobudur Area. *Procedia Environmental Sciences*, 28(Sustain 2014), 567–577. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.067>
- Hermawan, H. (2017). Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan serta Dampaknya terhadap Loyalitas Wisatawan. *Jurnal Media Wisata*, 15(1), 562–577.
- Horwath, H., & Jurong, S. (2016). Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Baseline Supply & Demand, Market Demand Forecasts, and Investment Needs. Jakarta.
- Kahani, M., Ghazi, I., Akbari, Z., & Hosseini, Z. (2016). Emergency police station location to provide municipal services after earthquake (Case study: Kerman). *International Journal of Health System and Disaster Management*, 4(4), 120. <https://doi.org/10.4103/2347-9019.196772>
- Mahubani, K. (2012). The Global Village has Arrived --. Finance and Development. Retrieved from <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/mahuban.pdf>
- Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-based rural tourism in inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072142>
- Mannakkara, S., Wilkinson, S., Willie, M., & Heather, R. (2018). Building Back Better in the Cook Islands: A Focus on the Tourism Sector. *Procedia Engineering*, 212, 824–831. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.106>
- Miller, A., Yeskey, K., Garantziotis, S., Arnesen, S., Bennett, A., O'Fallon, L., ... Hughes, J. (2016). Integrating health research into disaster response: The new NIH disaster research response program. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13(7), 1–12. <https://doi.org/10.3390/ijerph13070676>
- Pendampingan, T. M. T. (2019). Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pendampingan Melalui Perguruan Tinggi. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- Priatmoko, S. (2019). Perencanaan Pengembangan Destinasi Wisata Menggunakan Analisis MSP + DM. *Jurnal Khasanah Ilmu*, 10(1).
- Priyoga, I., & Sudarwani, M. M. (2018). Kajian Pola Ruang dan Rumah Adat Desa Penglipuran Bali. In *Prosiding Semarnusa IPLBI* (pp. 66–72). Surabaya: Laboratorium Perkembangan Arsitektur, Departemen Arsitektur ITS.
- Pudianti, A., Syahbana, J. A., & Suprapti, A. (2016). Role of Culture in Rural Transformation in Manding Village, Bantul Yogyakarta, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227(November 2015), 458–464. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.101>
- Purbasari, N., & Manaf, A. (2018). Comparative Study on the Characteristics of Community-Based Tourism between Pentingsari and Nglanggeran Tourism Village, Special Region Yogyakarta. *E3S Web of Conferences*, 31, 09007. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109007>
- Putri, F. A., & Adinia, N. C. (2018). The Role of Communication in Sustainable Development Tourism: A Case Study on Community-based Tourism (Pokdarwis) in Nglanggeran Village. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, VII(2), 153–161.
- Republik, I. UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Disaster Management), Pub. L. No. UU 24 (2007). Indonesia.
- Rindrasih, E. (2018). Under the Volcano: Responses of a community-based tourism village to the 2010 eruption of Mount Merapi, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/su10051620>

- Situmorang, R., Trilaksono, T., & Japutra, A. (2019). Friend or Foe? The complex relationship between indigenous people and policymakers regarding rural tourism in Indonesia. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 39(March 2018), 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.02.001>
- Tibay, V., Miller, J., Chang-Richards, A., Egbelakin, T., Seville, E., & Wilkinson, S. (2018). Business resilience: A study of Auckland hospitality sector. *Procedia Engineering*, 212(2017), 1217–1224. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.157>
- UNISDR. (2009). Risk. 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva: UNISDR.
- van den Honert, R. (2016). Improving Decision Making about Natural Disaster Mitigation Funding in Australia—A Framework. *Resources*, 5(3), 28. <https://doi.org/10.3390/resources5030028>